PENGUATAN EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KABUPATEN SINJAI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

AULIA RAMDHANI ARIEF

105641114216

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

PENGUATAN EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KABUPATEN SINJAI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Aulia Ramdhani Arief

Nomor Stambuk: 105641114216

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

04/05/2021
1 exp
Smb. Alumni
Pj 0050/1PM/21CP
ARI
P

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0170/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 24 April 2021.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si**
NBM: 730727	NBM: 1084366

PENGUJI

1. Drs. H. AnsyariMone, M.Pd (Ketua) ( )
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si ( )
3. Hardianto Hawing,ST.,MA ( )

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai
Nama Mahasiswa	:	Aulia Ramdhani Arief
Nomor Stambuk	:	105641114216
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.NuryantiMustari, S.IP.,M.Si	**Nur Khaerah, S.IP, M.IP**

Mengetahui:

Dekan	Ketua Prodi
Fisipol Unismuh Makassar	Ilmu Pemerintahan
Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos,M.Si	**Dr.NuryantiMustari,S.IP.,M.Si**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aulia Ramdhani arief

Nomor Stambuk : 10564111416

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 20 April 2021

Yang Menyatakan

Aulia Ramdhani Arief

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Sri Wahyuni. 2021. Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai. (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nur Khaerah).

Abstrak

Tujuan penelitian ini terkait Strategi pemerintah daerah dalam membangun kesetaraan gender pada bidang politik di Kabupaten Sinjai untuk mengetahui Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah penguatan eksistensi perempuan dalam bidang politik untuk mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten Sinjai yaitu adanya implementasi kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dan dorongan untuk lebih responisif gender, kemudian kapabilitas dalam dunia politik sudah meningkat, karena tidak ada lagi perbedaan gender dalam memimpin tergantung dari kapasitas perempuan dan kinerja, serta akesibilitas tentang politik telah banyak diberikan baik dari instansi pemerintah ataupun legislative. Faktor pendukung dalam penguatan eksistensi perempuan yaitu dukungan kebijakan dan dukungan masyarkat. Kemudian faktor penghambat dalam pengutan eksistensi perempuan dalam bidang politik yaitu aksesibilitas informasi dan faktor *patriarchy value*.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Penguatan Eksistensi Perempuan & Kapabilitas

KATA PENGANTAR

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Alhamdulilah penulis panjatkan Puji syukur terhadap Tuhan, Salam Sholawat kepada nabi. Baginda Rasulullah SAW, yang telah mengajari kita tentang kebenaran yang akhirnya mampu membebaskan kita dari jaring – jaring penindasan nafsu manusiawi kita. Beliau telah menjadi inspirasi dalam menyukseskan setiap perjuangan, menyelesaikan berbagai dinamika perjuangan.

Tiada hari yang terlewatkan tanpa sebuah spirit perjuangan. segala bentuk aktivitas adalah bagian daripada perjuangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal dalam penyelesaian skripsi ini cukup banyak hambatan, akan tetapi dengan kemauan dan ketekunan penulis serta berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khalik untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan, sehingga segala hambatan dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah ikut andil sampai skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa dengan segenap cinta dan hormat penulis haturkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Misdal Arief S.Pd Dan Ibunda Hj. Rahmiah S.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Harapan dan cita-cita luhur keduanya senantiasa memotivasi penulis untuk menambah ilmu, juga memberikan dorongan moral maupun material serta atas doa tulus buat penulis. Demikian pula

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

untuk saudaraku Zul Arsil Maulana Arief dan kak Inayah, Zul Ilman Maulana Arief dan Aulia Maulida Arief tiada kata yang mampu penulis defenisikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan pengertian yang kalian berikan selama penulis menempuh pendidikan.

2. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar serta Nur Khaerah, S.IP, M.IP selaku pembimbing II yang senantiasa selalu ada dan meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Seluruh Pimpinan Universitas, fakultas, bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. For all the members of UKM Bahasa who's given me a chance to developed my skill in so many ways. So, now I have some achievments in university and also can contribute to the campus join many competition Regional, National and International that's really affect to my academic. Being the most outstanding students in social.
5. *My Support System* yaitu Debate organaizer, Lambe Squad, perempuan Syurgah, Travel Mate, Saudara Till Jannah, wanita-wanita sholeh, Lima Terhebat yang telah setia membersamai penulis mulai dari awal

perjuangan menempuh pendidikan dibangku perkuliahan hingga sampai pada penyelesaian.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan ikut andil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 April 2021

Aulia Ramdhani Arief

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH iii
KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penlitian 5
D. Manfaat penelitian 6
BAB II 7
TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Konsep Kesetaraan Gender 11
C. Kerangka Pikir 24
D. Fokus Penelitian 27
E. Deskripsi Fokus Penelitian 27
BAB III 29
METODE PENELITIAN 29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 29
B. Jenis dan Tipe Penelitian 29
C. Sumber Data 30
D. Informan Penelitian 31
E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Teknik Analisis Data 33
G. Keabsahan Data 34
BAB IV 37
HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Keadaan Umum Kabupaten Sinjai 37
B. Penguatan Eksistensi Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Sinjai 43
BAB V 69

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KESIMPULAN DAN SARAN 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 71

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya patriarki tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan. Dominasi laki-laki atas perempuan telah menjadi realita sosial di berbagai negara. Budaya patriarki adalah sistem dimana perempuan dianggap sebagai "properti" dan laki-laki sebagai manusia (Charles dalam Susanto, 2015) Dalam hal ini, laki-laki menjadi subjek, dan perempuan sebagai objek yang diatur oleh laki-laki dalam kehidupan sosial dan budaya. Hal inilah yang membuat banyak perempuan berupaya untuk memperjuangkan derajat maupun hak mereka serta membebaskan mereka dari budaya tersebut, juga di kenal dengan kesetaraan gender sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa. Lebih lanjut Gender dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh sistem di mana keduanya berada. Untuk memahami konsep gender maka dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondidi dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. (Sumule et al., 2019).

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Namun pada kenyataannya kesempatan untuk menikmati kehidupan secara layak masih berada pada *control* kekuasaan laki-laki. Baik dari segi Pendidikan, lapangan pekerjaan hingga aspek politik.

Terkait dengan keterlibatan perempuan dalam aspek politik perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebab sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender (perempuan), sementara sebagaian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya. Maka dari itu telah di sahkan beberapa Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Kelompok Kerja Advokasi Kebijakan Publik, Tindakan Khusus Sementara Menjamin Keterwakilan Perempuan, 2002. Untuk menindak lanjuti keseriusan pemerintah terhadap penangan keterwakilan perempuan dalam bidang politik pemerintah menerapkan bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55).Jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih (Wahyudi, 2019).

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan PUG di Kabupaten Sinjai harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan dan mengeskan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai. Agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

Implementasi Undang-Undang terkait kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan di bidang politik dapat dilihat hasil pemulihan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

umum anggota DPR di Kabupaten Sinjai 2019-2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai akhirnya menetapkan 30 anggota DPRD Sinjai periode 2019-2024. Mereka merupakan legislator terpilih dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) dan 8 diantaranya adalah legilastor perempuan denganpersentase sebanyak 26,6%, angkaini hampir mencapai target 30%. Fakta tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, dalam mewujudkan kesetaraan gender khususnya pada bidang politik.

Dalam rangka pencapaian dan pelaksaan program kesetaraan gender yang telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai. Instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sinjai menggelar Pendidikan politik bagi Tokoh Wanita, dan penguatan Indeks Demokrasi Daerah dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat perempuan didunia politik sebagai upaya politisi perempuan mampu memainkan peran dalam pembangunan politik seperti pengambilan kebijakan afirmatif dan keterlibatan perempuan dalam politik.

Kemudian beberapa kegiatan yang diadakan oleh organisasi pemuda terkait Kesetaraan Gender Dari Berbagai Perspektif Perempuan Antara Fitrah Dan Tuntutan Latihan Kader Sensitive Gender yang merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendorong

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

peningkatan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan baik di pusat maupun di Daerah termasuk di Kabupaten Sinjai.

Banyak faktor yang menjadi tantangan salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap persoalan gender, terutama dari pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Minimnya anggaran pemerintah yang dialokasikan menjadi salah satu indikasinya.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terkait membangun kesetaraan gender pada bidang politik di Kabupaten Sinjai, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.

C. Tujuan Penlitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terkait Strategi pemerintah daerah dalam membangun kesetaraan gender pada bidang politik di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Untuk mengetahui Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan hususnya pada Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.

2. Secara Praktis

   Diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan pada pemerintah Kabupaten Sinjai dan masyarakat untuk bersinergi dalam mendukung Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Iradhat Taqwa Sihidi (2012)	Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal (Studi Penelitian Kiprah Politik Perempuan Sebagai Anggota Dprd Kota Malang Periode 2009-2014)	Partai politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di badan legislatif. Pola dan pengembangan sistem responsif gender kader perempuan bisa menjadi pintu masuk penguatan kapasitas daerah badan legislatif. Artikel-artikel tersebut diambil dari beberapa hasil penelitian merekomendasikan perlunya pembinaan perlakuan afirmatif terhadap kader perempuan baik dari struktur partai maupun dari luar struktur partai. Demikian pula, dalam hal strategi atau kebijakan internal partai, materi, dan metode pembinaan.
2.	(Nelli, 2015)	Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Studi Terhadap	Keterlibatan perempuan dalam politik penting, karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya bisa dipahami oleh perempuan itu sendiri. Jika masalah perempuan dipercayakan kepada

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

		Anggota Legislatif Di Provinsi Riau)	perwakilan yang tidak berperspektif masalah perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak sensitif terhadap isu perempuan. Saat ini keterwakilan perempuan masih rendah, tak terkecuali di Provinsi Riau. Namun rendah atau minimnya keterwakilan perempuan dalam agenda legislasi bukan berarti penguatan kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender (PUG) diabaikan. Menarik ditelusuri keberadaan legislator perempuan di wilayah Provinsi Riau yang berjumlah 18 orang dari 65 orang untuk Provinsi, tujuh perempuan yang duduk di Pekanbaru, dan enam perempuan di Kampar benar-benar mewakili perempuan di Provinsi Riau. Hasil penelitian menyimpulkan DPRD Perempuan di Provinsi Riau sangat peka dan memahami permasalahan dan isu gender / perempuan, namun karena masih minim menyebabkan banyak kendala yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender.
3.	Rizky Dwi Lestari, dan Dr. H. Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Si (2019)	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta Dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, bertujuan untuk mempercepat peran perempuan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Di Goal, tujuannya meningkatkan peran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

		Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	perempuan dalam politik. Lingkungan implementasi strategi dan lingkungan eksternal yang mengancam berasal dari pengaruh budaya Patriarkal. Ketidaksiapan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan pemahaman gender yang kurang lengkap. Kesempatan tersebut mendapat dukungan besar dari Bupati Karawang. Lingkungan internal didukung oleh kapasitas organisasi yang baik. Penetapan Arahan dilakukan dengan masing-masing SKPD di Karawang yang memiliki metode alur kerja analisis gender yaitu *(Gender Analysis Pathway)* GAP dan *(Gender Budget Statment)* GBS dengan menargetkan minimal 10 SKPD dan memaksimalkan kuota 30% perempuan untuk disahkan hingga target Ketua DPRD Karawang adalah perempuan.

Dari uraian tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan dari penilitan terdahulu dengan penelitian pertama diatas yang berjudul "*Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal (Studi Penelitian Kiprah Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 2009-2014)*" yaitu keterlibatan perempuan dalam bidang politik guna meraih kesetaraan gender dalam pembangunan politik lokal, hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini tentang peran dan keikutksertaan perempuan dalam lembaga legislatif.

Sedangkan persmaan pada penelitian terdahulu yang kedua diatas dengan judul "Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam

Mewujudkan Kesetaraan Gender" fokus penelitisn yang sama yaitu tentang eksistensi perempuan dalam bidang politik khususnya pada lembaga legislatif untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selanjutnya, persamaan yang terdapat penelitian terdahulu bagian ketiga diatas dengan judul "*Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang Dalam Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan*" yaitu memiliki tujuan yang sama dalam mempercepat keterlibatan peran perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bagian pertama yaitu pada penelitian ini berfokus pada penguatan eksistensi perempuan sedangkan dalam penelitian terdahulu keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan politik pada legislatif dari segi startegi, kebijakan dan metode pembinaan. Sedangkan pada bagaian kedua penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini salah satunya dalam menentukan indikator menggunakan teori *(Gender Analysis Pathway)* GAP dan *(Gender Budget Statment)* GBS mengenai gender dan eksistensi perempuan dalam bidang politik sedangkan peneliti menggunakan analisis indikator kebijakan, kapabilitas, dan aksesibilitas dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender pada bidang politik.

Perbedaan peneltian ini dengan penelitian terdahulu bagian ketiga adalah fokus peneletian dan penelitian terdahulu secara umum membahasa tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan peneltian ini berfokus pada startegi serta faktor-faktor yang menghambat eksistensi perempuan dalam memwujudkan kesetaraan Gender di Kabupaten sinjai.

Maka dari itu peneliti tertarik membahas mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kesetaraan Gender pada bidang Politik di Kabupaten Sinjai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Konsep Kesetaraan Gender

1. Kesetaraan Gender

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubahdan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat (Herien Puspitawati, 2013).

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupa perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan *distinction* dalam hal peran,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sitem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya. (Dwi Hani Febriyanti, 2013).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Analisis Gender

Analisis gender merupakan alat dan tehnik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diindentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan (Herien Puspitawati, 2013)

Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya, karena:

a. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
b. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.
c. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuaidengan tingkat permasalahannya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Teknik Analisis Gender Model Moser. Teknik analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser (Huda et al., 2013) seorang peneliti senior dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender *(Gender and Development)* GAD yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan *(Women in Development)* WID. Kerangka ini kadang-kadang diacu sebagai Model Tiga Peranan *(Triple Roles Models)* (Huda et al., 2013).

Adapun tujuan dari kerangka pemikiran perencanaan gender dari Moser adalah: (1) Mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan, (2) Membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhankebutuhan perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki, (3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis, (4) Memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumberdaya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda, (5) Memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur dan (6) Membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan (Harien Puspitawati, 2009).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ada 6 alat yang dipergunakan kerangka ini dalam perencanaan untuk semua tingkatan, mulai dari tingkatan proyek sampai ke tingkatan perencanaan daerah, yaitu:

1. Alat 1: Identifikasi Peranan Gender

   Tiga-Peran yang mencakup peran produkstif, reproduktif, dan kemasyarakatan/ kerja sosial) yang mencakup penyusunan pembagian kerja gender/ pemetaan aktivitas laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan dan anak laki-laki) dalam rumah tangga selama periode 24 jam.

2. Alat 2: Penilaian Kebutuhan Gender.

   Moser mengembangkan alat ini berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 1984. Penilaian kebutuhan gender didasari atas kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena dan mempertimbangkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat.

3. Alat 3: Pemisahan data/informasi berdasarkan jenis kelamin.

   Tentang kontrol atas sumberdaya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga (alokasi sumberdaya intra-rumahtangga dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam rumahtangga). Alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol sumberdaya dalam rumahtangga, siapa yang mengambil keputusan penggunaan sumberdaya dan bagaimana keputusan itu dibuat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Alat 4: Menyeimbangkan peran gender.

   Antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola tugas-tugas produktif, reproduktif dan kemasyarakatan mereka. Perlu juga diidentifikasi apakah suatu intervensi yang direncanakan akan meningkatkan beban kerja perempuan atau menambah penderitaan kaum perempuan.

5. Alat 5: Matriks Kebijakan.

   WID *(Women in Development)* dan GAD *(Gender and Development)* yang akan memberikan masukan untuk pengarusutamaan gender.

6. Alat 6: Pelibatan *stakeholder*.

   Organisasi Perempuan dan institusi lain dalam Penyadaran Gender pada Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari alat ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan masuk dalam proses perencanaan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di tingkat keluarga dan masyarakat (Harien Puspitawati, 2009).

3. Analisis Kebutuhan Gender

Moser mengembangkan alat ini berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 1984. Penilaian kebutuhan gender didasari atas kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena dan mempertimbangkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dibedakan atas:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Kebutuhan Praktis Gender

Berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan perempuan akan persediaan sumber air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunaiuntuk kebutuhan rumahtangga, dan pelayanan dasar perumahan. Mengidentifikasi kebutuhanpraktis perempuan sangat penting untuk memperbaiki kondisi kehidupankaum perempuan meskipun masih belum dapatmerubah posisi subordinat perempuan.

b. Kebutuhan Strategis Gender

Berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinat perempuan. Hal ini berhubungan dengan isu kekuasaan dan kontrol, sampai denganeksploitasi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kebutuhan strategis berhubungan denganperjuangan penyusunan jaminan hukum terhadap hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/setara, kesetaraan dalam memiliki properti, akses untuk mendapatkan kredit dan sumberdaya lainnyadan kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri.

4. Partisipasi Politik Perempuan

Pengertian politik yaitu secara etimologi politik berasal dari bahasaYunani yaitu *Politeia*, atau *polis* yang artinya adalah negara atau kota. Miriam Budiardjo politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau nagara) yang menyangkut

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Mifdal Zusron Alfaqi, 2015).

Pengertian Partisipasi Politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partaipartai atau organisasi-oraganisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri. Dengan Meningkatkan kesetaraan gender merupakan hal penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan secara terpadu.

Metode ini dapat diterapkan pada perjuangan agar menciptakan kesetaraan gender dalam dunia politik. Partisipasi politik juga memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis,
b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial,
c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus,
d. Sebagai sarana untuk memenuhikebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu.

Terkait partisipasi politik perempuan. Sebuah pengamatan mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapat jabatan politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. *Kelompok pertama* adalah perempuan yang memeroleh jabatan politik karena mereka memiliki hubungan dengan laki-laki tertentu. Misalnya, suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan. Ayahnya duduk di legislatif, putrinya dikader untuk duduk di legislatif. Ayahnya memiliki reputasi sosial politik, sehingga putrinya dianggap dan diposisikan cukup mampu menjadi anggota dewan.

Kelompok kedua adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebas tugas dalam membesarkan anak-anaknya. Hal itu menyebabkan usia karier politiknya menjadi lebih pendek. *Kelompok ketiga* adalah perempuan yang dalam usia muda 30-an terjun dalam politik. Biasanya, mereka telah cukup lama aktif dalam dunia ormas, LSM, atau organisasi ekstra kampus. Mereka inilah yang termasuk jenis politisi perempuan profesional karier yang jumlahnya paling sedikit akibat proses sosialisasi, pendidikan, dan rekruitmen politik perempuan yang tidak berakar dan berjalan secara sistematis (Mukarom, 2008).

Partisipasi perempuan di politik tidaklah berarti harus menjadi anggota partai politik atau sebagai anggota legislative. Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak dasar terutama hak sipil dan politik yaitu hak yang dimiliki untuk menyalurkan aspirasi dan

kepentingan kepada penyelenggara Negara di tingkat propinsi, kabupaten/kota.

Adapun yang dimaksud partisipasi atau peran serta dan posisi perempuan adalah situasi dan kondisi efektifitas keikutsertaaan perempuan dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan pada badan hukum atau lembaga public. Sedangkan yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah partisipasi perempuanyang bermakna mewakili perempuan mewujudkan kondisi dan posisinya sebagai sumber daya insani pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.

Partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain juga strategi komunikasi politik yang jitu, sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat.

Keterbatasan partisipasi perempuan akan sangat memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap upaya pengembangan masyarakat, termasuk juga pemberdayaan perempuan. Jika tingkat partisipasi politik masyarakat termasuk di dalamnya perempuan rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Dan hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Menurut teori kesetaraan dan keadilan gender (Herien Puspitawati, 2013) kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya.

a. Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut, Puspitawati kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss mendefinisian kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayan perempuan karena melalui keputusan politik, segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan. Sehingga dengan adanya one gate policy atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan.

Hak perempuan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan negaranya, diatur di dalam Pasal 7 Konvensi Perempuan. Termasuk di dalam hak ini adalah: 1. Hak untuk memilih dan dipilih; 2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya; 3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat; 4. Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Mencermati hak-hak perempuan seperti yang disebutkan diatas (pasal 7 Konvensi perempuan) cukup menggembirakan- bahwa hak perempuan dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak membedakan dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki, tapi dalam konteks realnya, kenyataan tersebut masih perlu terus diperjuangkan.

b. Kapabilitas

Kapabilitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat. (puspitawati, 2013)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas memampukan individu untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan mengebangkan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. (Mandacan et al., 2018).

Kapabilitas adalah daya respon atau gabungan komponen yang sangat berkaitan erat dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan atau beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah. Jadi konsep kapabilitas menunjukkan adanya kelenturan dan dinamis *(flexibility and dinamic)* dalam kemampuan.

Kapabilitas memiliki arti yang sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan *(skill)* saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya (Lestari et al., 2019).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Akseptibilas

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu. (Puspitawati, 2013) Akseptabilitas memiliki makna keterimaan, kecocokkan dan kepantasan. Dalam hal ini, keikutsertaan perempuan dalam pilkada mengisyaratkan akseptabilitas perempuan dalam jabatan publik.

Akseptabilitas perempuan dalam jabatan publik setidaknya ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama, perempuan setidaknya telah memiliki ambisi personal, sebuah tahapan yang penting untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Akseptabilitas perempuan dalam jabatan publik setidaknya ditentukan oleh beberapa aspek. Pertama, perempuan setidaknya telah memiliki ambisi personal, sebuah tahapan yang penting untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kedua, adanya peluang jabatan yang memungkinkan perempuan muncul sebagai kandidat politik. Dalam konteks ini perempuan setidaknya memiliki estimasi sumber-sumber politik sehingga bisa mengkampanyekan dirinya dalam proses kandidasi. Ketiga, dukungan organisasi politik yang memungkinkan perempuan dicalonkan oleh partai politik. Dukungan menjadi sangat penting untuk membantu perempuan memutuskan untuk mendapatkan jabatan.

C. Kerangka Pikir

Beberapa teori yang digunakan penulis dalam Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan gender

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

di Kabupaten Sinjai berdasarkan dari teori kesetaraan dan keadilan gender (Herien Puspitawati, 2013) kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Maka dari itu indikator penelitian yaitu kebijakan, kapabilitas dan aksesibilitas karena dapat mengukur keberhasilan serta dampak dari kebijakan dan melihat keterlibatan perempuan sehingga mampu menjelaskan bagaimana kondisi kesetaraan gender dalam bidang politik.

Maka hal itu yang menjadi indikator kerangka pikir penguatan eksistensi perempuan pada bidang politik untuk mewujudkan kesetaraan gender yang digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar Bagan 2.1 Kerangka Fikir

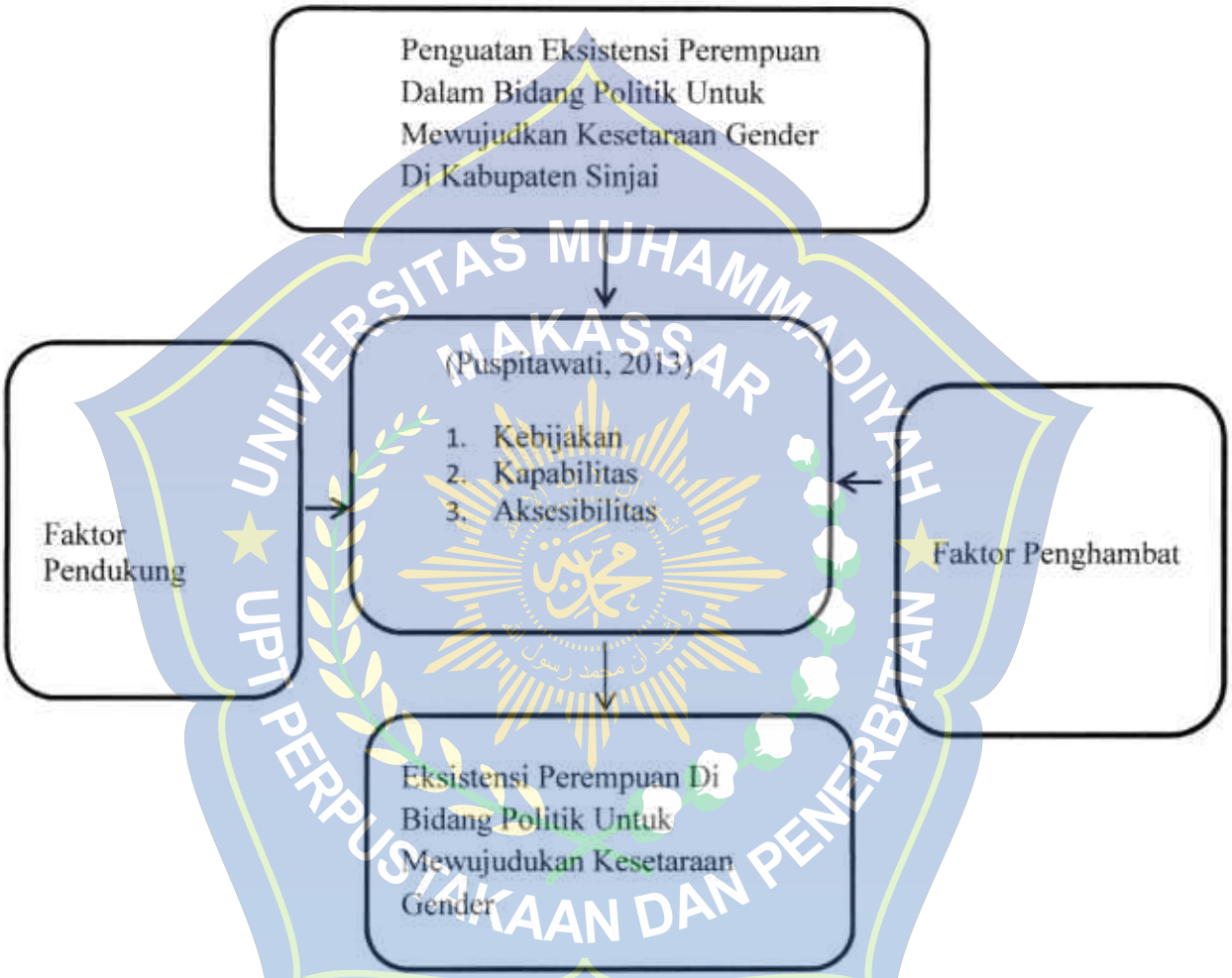

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian Penguatan Eksistensi Perempuan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik di Kabupaten Sinjai maka yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Identifikasi peranan gender dalam politik terkait kebijakan, kapabilitas dan aksesibilitas.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penguatan eksistensi perempuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik Di Kabupaten Sinjai.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kebijakan terkait keterlibatan perempuan yang dimaksudkan adalah adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah baik dari segi jabatan politik atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam mewujudkan Eksistensi Perempuan pada bidang pollitik untuk meujuedkan kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.
2. Kapabilitas yang dimaksud mengacu kepada kemampuan perempaun baik dari segi Pendidikan formal maupun pengalaman untuk memberdayakan sumber dayanya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Penguatan Eksistensi Perempuan Pada Bidang Politik Untuk Meuwjudkan Kesetraan Gender di Kabupaten Sinjai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Aksesibilitas adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk dapat memilih dan dipilih ataupun brkontribuasi pada pengambilan kebijakan tanpa ada hambatan domestic (rumah tangga) sebagai Penguatan eksitensi Perempuan Pada Bidang Politik Untuk Mewujudkan Keseteraan Gender di Kabupaten Sinjai.
4. Faktor Pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung suatu program agar dapat Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik Di Kabupaten Sinjai.
5. Faktor Penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dalam upaya Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik Di Kabupaten Sinjai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 bulan setelah seminar proposal dan lokasi penelitian bertempat di Kabuptaen Sinjai tentang Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena dapat dilihat dari data yang ada bahwa tidak menyeluruhnya peran perempuan dalam pemerintahan khususnya pada bidang bidang Politik sehingga ingin mengetahui penguatan eksistensi perempuan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di ranah politik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian dan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dengan masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis serta berhubungan antara fenomena yang di teliti.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan informan berdasarkan teori *theoretical sampling*, *Combination purposeful sampling* atau *Mixed purposeful sampling* dengan maksud Pemilihan informan dengan metode triangulasi yang bersifat fleksibel.

Teknik ini memiliki kelebihan karena dapat menggabungkan minat dan kebutuhan yang berbeda dengan melihat kapasitas infroman untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai, yaitu :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Nama/Jabatan
1.	Wakil Bupati Sinjai	Hj. Andi Kartini, SP., M. SP
2.	Anggota DPRD Sinjai dan Partai Politik	Zulkifli S.E (fraksi PPP)
3.	Komunitas Perempuan	Jenny Aprella Andaresta, S. Sos (Founder Ruang Emansipasi Sinjai)
4.	DP3AP2KB	Nurhaedah, S. Ag (Kasi Kesetaraan Gender)
5.	Kopel Sinjai	Akmal (Direktur Kopel Sinjai)
	TOTAL	5

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui laporan, artikel, dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan

dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2014), Triangulansi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

   Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Triangulansi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Trigulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Sinjai

1. Geografis

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah yang berjarak lebih kurang 223 km dari kota Makassar. Kabupaten Sinjai memiliki Luas 819,96 km2 terdiri dari 9 Kecamatan defenitif yaitu, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu Limpoe, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Bulupoddo, dan Pulau Sembilan. Dengan jumlah desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5° 2'56" sampai 5° 21' 16" Lintang selatan dan antara 119° 56' 30" sampai 120° 25' 33" Bujur Timur.

Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2015 adalah sebesar 238.099 jiwa denganlaju pertumbuhan penduduk 0,77 persen selama sepuluh tahun terakhir, terdiri dari115.202 jiwa penduduk laki-laki dan 122.897 jiwa penduduk perempuan, seperti yangnterlihat pada gambar berikut. Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai adalah 290 jiwa per km2 Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah yang memliki kepadatan terbesar yaitu 1.561 jiwa per km2.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap Kecamatan.

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kel/Desa
			Km2	%	
1	Sinjai Barat	Manipi	133,53	16,53	9
2	Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8,17	8
3	Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	16,10	11
4	Tellulimpoe	Mannanti	147,30	17,96	11
5	Sinjai Timur	Mangarabombang	71,88	8,77	13
6	Sinjai Tengah	Lappadata	129,70	15,82	11
7	Sinjai Utara	Balangnipa	29,57	3,61	6
8	Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	12,13	7
9	P. Sembilan	Kambuno	7,55	0,92	4

Sumber. Sinjai dalam angka tahun 2019

2. ***Kondisi Politik Pemerintahan***

Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9 kecematan definitif. Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kantor Sekertaris daerah kabupaten Sinjai, pada tahun 2015 terdapat 67 desa definitif, 13 Kelurahan dan 354 Dusun/Lingkungan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk tenaga fungsional guru menurut Badan Kepegawaian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Daerah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak 5.781 orang denganrincian 2.552 laki-laki dan 3.229 perempuan.

Adapun jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sinjai dari Tahun 2014 ke belakang jumlahnya hanya 20 orang. Sejak periode 2019-2024 berjumlah 30 orang dengan rincian 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Dari priode ke periode tingkat keterpilihan perempuan itu sendiri meningkat yang awalnya dari priode ke priode hanya ada satu bahkan tidak ada namun pada priode 2009-2014 keterwakilan perempuan yang awalnya 1 menjadi 4 dan meningkat lagi pada priode 2009-2019 menjadi 7 orang dan saat ini di periode 2019-2024 berjumlah 8 orang kalau di persentase sebanyak 26,6%.

Partai yang berhasil mendudukkan keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten Sinjai yaitu 1 orang dari Partai Gerindra, 1 orang dari Partai Kesatuan Bangsa, 1 orang dari Partai Amanat Nasional, 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtra, 1 orang dari Partai Persatuan Pembangunan, 1 orang dari Partai Hanura, 1 orang dari Partai Demokrat, dan 1 orang dari Partai Nasdem. Berikut tabel jumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai Menurut asal partai dan jenis kelamin.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 4.2 Daftar Partai Politik dan Perolehan Kursi di DPRD 2019-2024

No	Nama Parpol	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	GERINDRA	4	1	5
2.	PKB	1	1	2
3.	GOLKAR	4	-	4
4.	PAN	2	1	3
5.	PDIP	1		1
6.	PKS	2	1	3
7.	PPP	2	1	3
8.	HANURA	1	1	2
9.	DEMOKRAT	2	1	3
10.	NASDEM	3	1	4
	JUMLAH	**22**	**8**	**30**

Sumber. Data DP3AP2KB 2019

3. ***Gambaran Umum DP3AP2KB***

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 40 Tahun 2012 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Pada awalnya kedua instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan Instansi vertikal dimana kewenangan pengelola Bidang Keluarga Berencana telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan Edaran Menteri pada Negeri No. 130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan instansi pangkat daerah yang bernama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bermula

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.15 XE 2011 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah umumnya penunjang pemerintah Kabupaten Sinjai di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang sudah melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Visi dan Misi dan Bidang Fokus Penelitian.

a. Visi

Berdasarkan pemerintahnya dianalisis yang mendalam maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai beserta DPRD Kabupaten Sinjai menyambungkan dua instansi tersebut yang juga merupakan konsekuensi dari persiapan otonomi daerah. Dengan mencanangkan visi "Perempuan dan Keluarga Pilar Utama dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Religius, Cerdas, Sehat Dan Sejahtera".

b. Misi

1) Mewujudkan Keserasian dukungan Kebijakan dan Penatalaksanaan Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
2) Mewujudkan Pembinaan Teknis Operasional, dan Fasilitasi yang Sinergi dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Pemberdayaan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang Berpersektif Gender.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3) Meningkatkan Penguatan, Swadaya, Kemandirian Keluarga dan Masyarakat.

Adapun fokus penelitian di Dinas P3AP2KB terkait kesetaraan gender, yaitu di bidang:

a) Bidang Kesejahteraan Dan Data Gender

Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh kepala Bidang yang Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi operasional menyangkut pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian keuangan, dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Kesetaraan Dan Data Gender mempunyai fungsi : (a) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan pengarusutamaan gender; (b) Pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang kebijakan pengarusutamaan gender serta kelembagaan pengarusutamaan gender; (c) Perumusan kebijakan pengarusutamaan gender bidang kebijakan pengarusutamaan gender serta kelembagaan pengarusutamaan gender; (d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b) *Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak*

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : (a) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi Advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak; (b) Penyusunan rencana kerja dan pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang erlindungan perempuan dan anak; (c) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang perlindungan perempuan dan anak; (d) Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak; (e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organosasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Penguatan Eksistensi Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Sinjai

Penguatan eksistensi perempuan merupakan suatu Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun secara komprehensif pelibatan permpuan dalam bidang politik bukan hanya memiliki peran atau jabatan

dalam sektor Legislatif atau Eksekutif, lebih dari pada itu terkait kepada keterlibatan perempuan untuk mengambil kebijakan, ikut serta dalam pembangunan daerah dan memiliki peluang untuk pemenuhan hak-hak atas perempuan.

Eksistensi perempuan hingga saat ini begitu penting, bukan hanya sekedar wacana kesetaraan gender, akan tetapi berdampak pada masa depan pembangunan suatu daerah atau negara. Sebab, perempuan adalah pondasi bangsa. Mereka yang memiliki peran besar untuk meneruskan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Tentunya dengan memberikan akses Pendidikan, memberikan peluang untuk berkiprah setara dengan laki-laki, dan memberikan ruang gerak serta support untuk melakukan hal-hal inovatif tanpa adanya diskriminasi masyarakat atas label perempuan, yang masih di anggap lemah.

Maka dari itu untuk melihat bagaiaman peran pemerintah dalam penguatan eksistensi perempuan, dalam penelitian dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: (a) kebijakan, (b) kapabilitas dan (c) aksesibilitas. Adapun hasil penelitian terkait Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai, sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu strategi pemerintah untuk mengarahkan semua *stekholder* untuk mentaati pengambilan keputusan dengan tujuan tertentu. Kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap

peningkatan pemberdayaan perempuan, untuk mendukung segala aktifitas perempuan. Dengan adanya keputusan politik melalui kebijakan oleh pemerintah maka seharusnya semua jajaran pemerintahan, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif ikut andil dalam mendorong peran perempuan dalam semua wilayah khususnya politik.

Menteri Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan kebijakan tentang *one get policy* atau kebijakan satu pintu untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitif gender. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyambung kebijakan Pemerintah Kabupaten Sinjai juga mengeluarkan Paraturan Daerah nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Bab II Pasal 2 PUG berazazkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi.

PUG merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender.

Hal ini didukung dari hasil wawancara bersama Wakil Bupati Sinjai, A.K dan juga beliau seorang perempuan dan juga Wakil Bupati pertama perempuan di Kab. Sinjai, mengatakan bahwa:

> "Terkait di Kab. Sinjai kita telah di dukung oleh PERDA Perlindungan Perempuan dan Anak, ada juga PUG maupun sampai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> kepada tahap evaluasi. Tentu ini suatu peluang yang besar untuk kaum perempuan sudah bisa berada di ranah eksekutif dan legislative" (hasil wawancara Wakil Bupati Sinjai, 4 Februari 2021)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, respon Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap isu perempuan dan eksistensinya, menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan. Untuk mendukung kebijakan PUG maka pemerintah memberikan kegiatan perempuan yang berorientasi politik, seperti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh kesbangpol dan seminar politik yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008, minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat, memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam semua sektor, sektor perncanaan dan sektor pembangunan.

Keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan. Salah satu upaya untuk menguatkan eksistensi perempuan dengan memaksimalkan kesempatan terkait pemeberian kouta 30% untuk perempuan.

Hasil penelitian terkait kebijakan berimplikasi terhadap teori yang dikemukakan oleh puspitawati bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang membuatnya maupun mentaatainya (yang terkena kebijakan itu).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dalam artian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah landasan atau acuan pemerintah/instansi untuk menjalankan dan di taati agar menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam penguatan eksistensi perempuan.

Pada hasil wawancara bersama A.K:

> "Kita diberi peluang terutama dalam UU 30% kouta untuk perempuan, sehingga peluang ini yang harus kita raih dan harus kita rebut, yah tentunya dengan meningkatkan kapasitas, kualitas diri sehingga bisa bersaing dan bisa diakui oleh kaum laki-laki" (hasil wawancara Wakil Bupati Sinjai, 4 Februari 2021)

Melihat hasil dari dukungan pemerintah dapat dilihat keberhasilannya di Legislatif maupun Eksekutif. Di Legislatif sudah hampir mencapai 30% yaitu dengan jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Kab. Sinjai sebanyak 8 orang, dan ranah Eksekutif tertinggi kedua yaitu Wakil Bupati adalah seorang perempuan.

Tidak hanya itu beberapa jabatan penting di Instansi atau Dinas Kab. Sinjai, di duduki oleh perempuan. Seperti, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas P3AP2KB, Asisten 2, Asisten 3 Kab. Sinjai. Tentunya di barengi dengan kualitas dan kapabilitas yang mempuni sehingga pantas berada pada posisi penting politik pemerintahan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari *support* segala *stekholder* yang menginginkan eksistensi perempuan tetap terjaga. Melalui Pendidikan dan pelatihan politik atau seminar keperempuanan dan politik yang diadakan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas P3AP2KB serta beberapa partai yang *aware* terhadap perempuan dan politik.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Seperti yang dijelaskan oleh N sebagai Kepala Seksi Kesetaraan Gender di Dinas P3AP2KB menjelaskan bahwa:

> "Terkait dengan kebijakan pemerintah, di kantor kita ada bidang yang menangani, yaitu bidang kesetaraan dan data gender. Di dalamnya ada seksi kesetaraan gender bidang politik, hukum sosial dan ekonomi dengan memberikan APBD untuk melaksanakan suatu program yaitu seminar pendidikan politik" (hasil wawancara Kasi Ksetaraan Gender 3 Februari 2021)

Usaha pemerintah terlihat dalam berbagai program untuk mendukung kapabilitas perempuan dengan memberikan rutin memberikan Seminar dan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada organisasi perempuan sebagai salah satu perwujudan untuk memberdayakan perempuan dan memberikan pengatuahuan terkait politik agar mampu terjun di dunia politik melalui organisasi keperemuanan yang dapat diakses oleh semua masayarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Salah satu organisasinya yaitu Darmawanita, Aisyiah, dan Nasyiatul Aisyiah.

Tentunya hal ini diberikan bantuan dana dari pemerintah melalui APBD untuk melaksanakan program-program keperempuanan, baik dari segi pengetahuan politik maupun keislaman. Karena beberapa program yang dilaksanakan juga melibatkan ibu-ibu pengejian dan majelis taklim, jadi pada akhirnya perempuan mampu menguasai segala sektor dan tetap mempertahankan eksistensinya.

Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menguatkan eksistensi perempuan, partai politik PPP juga memberikan program atau membuatkan kegiatan Pendidikan politik atau pengkaderan untuk

memperkenalkan terkait perempuan dan politik. Seperti yang dipaparkan oleh Z sebagai Sekretaris PPP dan juga anggota DPRD Kab. Sinjai periode 2019-2024, menjelaskan bahwa:

> "Tentunya dengan membuatkan kegiatan pendidikan politik atau pengkaderan khusus kaum perempuan, agar keterlibatan perempuan dalam agenda-agenda politik PILKADA atau PEMILU kami mengharapkan untuk bekerja secara maksimal dan memberikan ouput yang baik, karena yang mengerti tentang perempuan yah hanya perempuan itu sendiri" (hasil wawancara anggota DPRD Kab. Sinjai 2 Februari 2021)

Terkait wawncara tersebut, hampir semua sektor pemerintahan dan swasta telah paham dan ikut andil dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas serta memberikan akses kepada setiap perempuan, melalui kebijakan dan program-program yang dilaksanakan. Dalam artian kebijakan pemerintah daerah telah meningkat dan berkembang bukan hanya sebagai formalitas tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender khususnya pada bidang Politik di Kab. Sinjai.

2. Kapabilitas

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu pengembangan Pendidikan politik perempuan perlu diperhatikan dan selalu ditingkatkan melalui berbagai program yang dimiliki oleh pemerintah baik dari segi organisasonal maupun pemantapan pilar-pilar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

demokrasi melalu lembaga legsilatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.

Dengan itu pemerintah Kab. Sinjai mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan kapabalitas perempuan serta pemahaman terkait politik maupun peningkatan potensi, kualitas dan mampu memberikan perubahan positif di berbagai bidang, agar nantinya mampu berkontribusi dan berkompeten pada bidangnya masing-masing, khususnya pada bidang politik.

Seperti yang di kemukakan oleh N sebagai Kasubid Politik dalam Negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengatakan bahwa:

> "Khusus di Kesbangpol diadakan Pendidikan Politik setiap tahun, sebagai program untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sasarannya yaitu, tokoh-tokoh wanita, partai politik, organisasi perempuan, ketua tim PKK desa atau kelurahan, dan rencana di tahun ini yang menjadi sasaran adalah pemilih pemula atau *millennials*" (hasil wawancara oleh Kasubid politik dalam negeri, tanggal 10 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, salah satu program pemerintah yang di anggarkan setiap tahun untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa masyarakat harus mampu menjalankan tugas partisipasi politik. Serta untuk memberikan edukasi terkait politik dan membiasakan untuk berbicara tentang politik,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sehingga nantinya bukan hal yang tabu lagi bagi seorang perempuan untuk ikut dan menyuarakan dirinya dalam kontes politik, baik pilkada atau pemilihan legislative.

Secara umum, fungsi lembaga legislatif berkisar pada fungsi perundang-undangan/legislasi, fungsi anggaran/budgeting dan fungsi pengawasan/controlling (pasal 316 ayat (1). Menurut undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, keseluruhan hak DPRD pada dasarnya memuat fungsi-fungsi tersebut.

Keberhasilan untuk tetap mempertahankan program-program pro perempuan dalam memberikan edukasi tidak lepas dari kerja keras perempuan dalam parlemen untuk memperjuangkan hak sesamanya, membuktikan kesuksesasan perempuan sebagai wakil rakyat dalam parlemen untuk menjalankan perannya sebagai controlling yaitu mempertahankan kebijakan atau membuat kebijakan untuk perempuan atau lainnya, serta ikut andil dalam penepatan belanja daerah yang sebagian alokasinya harus diberikan untuk pembangunan dan pemberdayaan perempuan, seperti yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam pemeberian edukasi politik khusus untuk perempuan.

Peningkatan pengetahuan politik serta soft skill sebelum menjadi wakilan rakyat dirasa penting, agar dapat ikut serta dalam perencanaan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pendampingan, pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi dan kebijakan yang dikeluarkan pro perempuan dan pro rakyat, karena telah mengetahui isu-isu perempuan dan juga dibekali Pendidikan dasar politik. Sebab, reprsentasi politik perempuan merupakan suatu elemen penting jika ingin menempatkan konteks demoratisasi dalam perspektif yang ramah gender.

Maka dari itu terdapat beberapa program unggulan pemerintah Kab. Sinjai untuk kaum perempuan, yaitu:

1. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Meminimalisir terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak
3. Mengoptimalkan peran perempuan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi
4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Sinjai, 2020).

Hasil penelitian terkait kapabilitas berimplikasi pada teori Kapabilitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat. (puspitawati, 2013)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Penguatan kapabilitas berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan perempuan dan keterampilan memimpin, terkait pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor sudah tidak ada lagi. Semua di tempatkan sama sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki, dan tidak ada pemisahan jabatan khusus laki-laki dan perempuan. Seperti yang dipaparkan oleh Kasi Kesetaraan Gender dinas P3AP2KB, mengatakan bahwa:

> "Pembagian kerja laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada perbedaan. Siapa bilang laki-laki tidak bisa memasak dan perempuan tidak bisa mencangkul, semua disamakan haknya. Di kantor kita sendiri terdapat 4 bidang, 2 kepala bidang laki-laki 2 kepala bidang perempuan dan sekertarisnya laki-laki lalu kepala dinasnya perempuan" (hasil wawancara oleh kasi kesetaraan gender, tanggal 3 februari 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan dan kemampuan untuk memimpin sebagai seorang perempuan tidak diragukan lagi, karena dapat dilihat bahwa jabatan startegis di bagian pemerintahan tidak tersentralisasi oleh laki-laki, tapi berdasarkan kapabilitas yang dimiliki, dan saat ini perempuan sudah banyak mengambil peran penting. Terkait kesetaraan gender telah diimplementasikan dan bukan hanya sekedar teori, tapi melihat berdasarkan kualitas seseorang. Hal ini berdampak pada tingkat keberdayaan perempuan di Kab. Sinjai, semakin tahun semakin meningkat di banding tahun sebelumnya. Berikut tabel yang menggambarkan tingkat partisipasi perempuan di Lembaga politik pemerintahan, untuk melihat tingkat keberdayaan perempuan di Kab. Sinjai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 4.3

Data gender dinas P3AP2KB Jumlah Pekerja Di Lembaga Politik Kabupaten Sinjai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Staf Ahli Bupati	9	4
2	Kepala Kantor Camat	7	2
3	Inspektorat	6	1
4	Kepala Dinas	18	4
5	Bupati	1	0
6	Wakil Bupati	0	1
7	Anggota DPRD Kab/Kota	23	7
8	Perangkat Desa	125	28
9	Kepala Desa	50	2
	Jumlah	**239**	**49**

Sumber: Website Struktur UPTD Kab. Sinjai

Tingkat keterampilan dan keterlibatan perempuan pada wilayah sosial kemasyarakatan, anggota DPRD juga telah aktif untuk melakukan kunjungan dapil guna menampung aspirasi masyarakat khususnya perempuan. Seperti yang dipaparkan oleh anggota DPRD kab. Sinjai, Z mengatakan bahwa:

> "Alhamdulillah, hampir setiap saat melakukan kunjungan dapil kemasyarakat. Ya itulah perempuan selalu turun untuk bersentuhan langsung karena mereka memiliki rasa kepakaan yang tinggi untuk mengetahui keadaan sesamanya, baik keadaan yang bersifat sosial, budaya maupun ekonomi" (hasil wawancara anggota DPRD Kab. Sinjai tanggal 2 Februari 2021)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kapabilitas seorang perempuan untuk menjadi wakil rakyat juga penting karena selalu menyangkut dengan hak dan kepentingan warga masyarakat terutama perempuan, dan juga karena memiliki kelebihan yaitu memiliki kepekaan yang tinggi. Hal ini merupakan faktor yang utama sebagai anggota DPRD yang memiliki peranan sebagai, *legislator, budgeting* dan *controlling*. Dengan memiliki pengalaman langsung di lapangan serta kemampuan untuk mengamati kebijakan yang dibutuhkan untuk merepresentasikan suara rakyat khususnya perempuan di legislasi pada saat perancangan peraturan daerah, jadi mereka mampu menyelesaikan dan membantu permasalahan perempuan baik dari segi luar maupun dalam, jadi tidak diragukan lagi perempuan dalam segi kapabilitas untuk menjadi pemimpin.

Tabel 4.4 Latar Belakang Pendidikan Struktur OPD di Kab. Sinjai

No	Jenis Pekerjaan	Latar Belakang Pendidikan	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Staf Ahli Bupati	S2	**S2**
2	Kepala Kantor Camat	S1	**S2**
3	Inspektorat	S2	**S2**
4	Kepala Dinas	S2	**S2**
5	Bupati	S2	-
6	Wakil Bupati	-	**S2**
7	Anggota DPRD Kab/Kota	S1	**S1**
8	Perangkat Desa	S1	**S1**
9	Kepala Desa	S1	**S1**

Sumber: Website Struktur UPTD Kab.Sinjai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Adapun latar belakang pendidkan para politisi dikabupaten sinjai, sebagian besar adalah S2 baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat kesamaan latar pendidikan anatara perempuan dan laki-laki mulai dari jenis pekerjaan Staf Ahli Bupati hingga kepala desa. Namun keterlibatan perempuan didalamnya juga menjadi sangat dominan karena dipengaruhi kapabilitas yang mumpuni untuk menduduki posisi yang sesuai di pemerintahan.

Salah satu program yang dimiliki untuk berkontribusi aktif kepada masyarakat dalam pembangunan dunia politik. Dengan memberdayakan perempuan dalam hal melakukan pertemuan dan pendampingan yang bersifat edukatif dalam bidang ekonomi kerakyatan misalnya usaha kecil dan menengah.

Menyambung terkait peluang dalam keterlibatan perencanaan dan evaluasi di ranah politik, menjelaskan bahwa:

> "Khusus di partai persatuan pembangunan, hampir setiap posisi kepengurusan jabatan kami memperhatikan 30% baik di tingkat DPC maupun di tingkat anak cabang yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di kab. Sinjai. Ada yang kami jadikan sebagai ketua pimpinan anak cabang dan ada juga sebagai sekertaris DPC karena kami juga mengedepankan kesetaraan gender. Khusus di DPRD kami menempatkan Ibu Hj. Nurbaya Toppo selaku pimpinan di Komisi A yaitu sekertaris komisi dan wakil ketua komisi juga perempuan" (hasil wawncara bersama anggota DPRD kab. Sinjai tanggal 2 Februari 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan serta peluang dalam dunia politik sudah meningkat, karena kolaborasi kerja dan kinerja dalam kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan sudah banyak di

implementasikan berbagai sektor, baik di ranah pemerintahan maupun legislative dan partai politik.

3. Aksesibilitas

Akses peluang ataupun kesempatan dalam hal ini, keikutsertaan perempuan dalam politik serta pemberian akses atau kesempatan untuk berkiprah di dunia politik dalam rangka perwujudan kesetaraan gender. Agar tercapainya aksesibilitas bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama dan setara tanpa adanya perbedaan gender. Maka dari itu beberapa program yang diberikan pemerintah dan legislative terhadap akses politik dan edukasi.

Seperti yang dijelaskan oleh direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislative) Sinjai sebagai pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan juga pemantauan kinerja anggota DPRD yaitu A, menerangkan bahwa:

> "Kita dapat melihat dari sistem pemilu, bahwa pemerintah membuka peluang untuk peran serta dalam keterlibatan perempuan. Misalnya partai A ingin menjadi peserta pemilu harus mempunyai caleg perempuan minimal 30% atau 2/3 perempuan yang masuk daftar caleg partai A" (hasil wawancara bersama direktur KOPEL Sinjai tanggal 10 Februari 2021)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong partisipasi perempuan untuk membuka jalan dan terlibat dalam politik serta memberikan ruang partisipasi perempuan untuk di pilih dan memilih.

Keterlibatan perempuan masih di *massive*kan karena keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan wajib untuk dilibatkan. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Bupati Sinjai, bahwa:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

"Memberi ruang kita harus mendorong perempuan untuk terlibat dalam hal politik, mulai dari sosialisasi, Pendidikan politik dan penting untuk memberikan pemahaman bahwa politik suatu hal yang sangat penting untuk merubah suatu kaum dan memberikan manfaat" (hasil wawancara wakil bupati sinjai tanggal 4 Februari 2021)

Hasil penelitian terkait kapabilitas berimplikasi pada teori Aksespsibilitas adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu. (Puspitawati, 2013) Di jelaskan bahwa kesempatan dan keterlibatan harus selalu *support* dengan berbagai cara. Karena politik bagi perempuan suatu fundamental untuk menyuarakan gagasan dan juga merupakan kesempatan agar lebih berguna dalam kepentingan yang lebih besar minimal kita harus terlibat dalam kepentingan politik setidaknya untuk terlibat dalam penentuan kebijakan dan penganggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Tabel 4.5 Representasi Perempuan dalam DPRD Kab. Sinjai

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dapil 1	7	2
2	Dapil 2	8	0
3	Dapil 3	4	3
4	Dapil 4	5	1
5	Wakil Ketua Komisi	2	2
6	Sekertaris Komisi	1	1
	Jumlah	27	9

Sumber: Data Gender DP3AP2KB

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dapat dilihat bahwa kesempatan dan aksesibilitas perempuan saat ini sudah semakin besar, karena jumlah persentase perempuan setiap dapil tidak terlalu jauh, hanya ada satu dapil yang tidak memiliki represantasi perempuan, hal inilah yang perlu di tingkatkan lebih jauh lagi.

Namun untuk melihat lebih jauh aksesibilitas perempuan dapat dilihat keikusertaannya dalam memberikan ketentuan dan memberikan aspirasinya, seperti dalam perumusan Badan Anggaran tahun 2019-2024 di Kabupaten Sinjai terdapat 2 perempuan anggota DPRD yang ikut serta perwakilan Fraksi PKB dan Hanura. Perumusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdapat 2 perempuan perwakilan fraksi Gerindra dan PKB. Rapat konsultasi Badan Musyawarah terdapat 3 perempuan perwakilan fraksi Demokrat, PAN dan PKS.

Dapat dilihat bahwa pemberian peluang dan keikutsertaan perempuan selalu di perhitungkan, baik dari segi pengambilan keputusan atau pengasawa dan juga baik dari pemerintahan atau politik. Menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam bidang politik di kabupaten Sinjai, sudah terimplementasi dengan baik dan dapat dilihat dari jumlah represanti perempuan yang terlibat dalam agenda-agenda penting.

Adapun usaha partai politik untuk membuka peluang untuk perempuan berpolitik yaitu dengan menyiapkan wadah untuk memfasilitasi perempuan yang ingin berkecimpung di partai politik.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Seperti yang dikatakan oleh anggota partai persatuan pembangunan sekaligus anggota DPRD kab. Sinjai, memaparkan bahwa:

> "Kami menyiapkan organisasi sayap PPP khusus perempuan, yaitu Wanita Persatuan Pembangunan, inilah tempat mereka bergabung untuk menjadi kader kami kedepan, dan kami sampai hari ini masih membuka dan menunggu jika ada perempuan yang masih ingin berkontribusi dalam dunia politik atau dapat juga bergabung DPC" (hasil wawancara sekertaris partai PPP tanggal 2 Februari 2021)

Hasil wawancara membuktikan bahwa perhatian untuk penyediaan akses berpolitik khususnya di Kab. Sinjai, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah setempat tetapi juga telah mendapatkan perhatian lebih oleh legislative dan partai politik agar perempuan memiliki *power* dan terlibat dalam politik. Seperti organisasi wanita persatuan pembangunan sebuah wadah berhimpunnya perempuan yang ingin berpartisipasi dan memberikan perubahan, serta pemberian pemahaman terkait pentingnya politik kepada perempuan melalui sekolah politik atau pengkaderan partai.

3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Pemerintah

Faktor pendukung menjadi salah satu unsur penting dalam menerapkan sebuah kebijakan atau tercapainya sebuah misi. Dalam penguatan eksistensi perempuan di bidang politik, beberapa

informan menuturkan beberapa faktor pendukung yang mampu memberikan *support.*

Yaitu dengan melihat respon pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan menjadi landasan utama dan legalitas kegiatan setiap instansi pemerintah dan lembaga politik untuk mendukung perempuan berkiprah di dunia politik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama direktur kopel Sinjai.

Menurut A, direktur Kopel Sinjai mengatakan bahwa:

> "terkait regulasi yang sudah di dukung oleh kebijakan karena adanya aturan Kouta 30% caleg perempuan juga karena beliau mengangap bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga masyarakat sekarang sudah cerdas dengan tidak membedakan caleg laki-laki dan perempuan namun dengan melihat ketokohan orang tersebut" (hasil wawancara direktur Kopel Sinjai tanggal 10 Februari 2021)

Jadi karena adanya kesetaraan gender, karena aturan 30% kouta sehingga membuka peluang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan. Sehingga hampir mencapai 30% keterwakilan perempuan yaitu, pemilih sudah cerdas, ada peluang perempuan untuk duduk di legislatif dan perempuan sudah berfikir untuk memilih sesama perempuan dengan alasan bahwa perempuanlah yang memperjuangkan hak kita sebagai perempuan.

Sehingga persentase perempuan yang menduduki legislative saat ini sudah hampir memenuhi 30% kouta yang disediakan, berkat dukungan pemerintah daerah yang dituangkan dalam

PERDA nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender agar responsif dalam menanggapi issu gender di kabupaten Sinjai.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Kasi kesetaran gender dinas AP2KB, bahwa:

> "organisasi perempuan juga selalu mendukung kita punya kegiatan, dengan turut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kesetaraan gender dan selalu disambut positif, seperti kegiatan tahunan yang diadakan salah satunya dalam rangka menyambut hari ibu misalnya meeka turut serta dalam kegiatan tersebut dan pemerintah juga mendukung dengan di support dana oleh APBD, hanya karena pademi kemarin jadi tertunda dananya, yah semoga tahun ini sudah bisa terlaksana Kembali" (hasil wawancara kasi kesetaraan gender tanggal 3 Februari 2021)

Seperti halnya yang diutarakan oleh Wakil Bupati Sinjai dan Kasi kesetaraan gender dinas AP2KB, bahwa *awereness* bagi perempuan merupakan faktor utama untuk mewujudkan kesetaran gender karena sudah saatnya perempuan berjuang untuk duduk di legislatif karena kebutuhan untuk masyarakat perempuan luar biasa besaranya dan kebutuhan perempuan tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki serta akan terjadi ketipangan dimana tidak imbang antara kepentingan laki-laki dan perempuan seperti dalam hal kebijakan pemerintah misalnya, tempat pelayaanan umum dimana diberi ruangan khusus untuk menyusui dan siapa lagi yang dapat meyuarakannya selain perempuan.

b. Dukungan Masyarakat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat ikut berkontribusi dan mengaktifkan diri dalam kegiatan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu salah satu sumber kesusksesan penguatan eksistensi perempuan dalam bidang politik di kabupaten Sinjai, yaitu masyarkat ikut serta dalam menyukseskan program-program pro perempuan. Seperti rajin menghadiri seminar politik, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dan dinas P3AP2KB.

Hal ini di jelaskan oleh wakil bupati Sinjai, yang selalu turut serta dalam kegiatan-kegiatan seminar maupun pendidikan politik sebagai pemateri.

Menurut Wakil Bupati Sinjai, bahwa:

> "dari beberapa program yang keluarkan oleh pemerintah seperti Pendidikan politik yang hampir semua perempuan dilibatkan selalu bersemangat untuk hadir, itu artinya bahwa semangat perempuan sekarang untuk terlibat di politik tidak diragukan lagi dan tidak takut lagi, karena melihat sekarang sudah banyak teman-teman perempuan yang sudah tampil, jadi makanya sebagai perempuan kita harus mempunyai kapasitas sehingga orang mau tak mau mengakaui bahwa kita memang pantas di legislative eksekutif" (hasil wawancara Wakil Bupati Sinjai tanggal 4 Februari 2021)

Ketika masyarakat aktif terlibat kegiatan terkait edukasi politik akan hal ini akan berdampak positif oleh masyarkat itu sendiri karena akan selalu menambah pengetahuan dan menambah skill serta memahami kendala-kendala yang terjadi dilapangan dan mendiskusikan dalam seminar kelompok sehingga solusi yang di keluarkan nantinya akan sangat membantu perempuan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Secara tidak langsung hal ini juga membantu skill negosisasi dan problem solving jadi kapasitas inilah yang akan membantu eksistensi perempuan nantinya, untuk di pilih dan memilih. Dan nantinya akan menjadi pemilih cerdas sehingga mengurangi *money politic*.

Adapun menurut Z sebagai anggota DPRD dan sekertaris fraksi PPP, bahwa:

> "dalam hal mensosialisakan dirinya khsusnya dalam pemilihan legislative perempuan memiliki keunggulannya tersendiri yaitu mereka mampu menyentuh lini terdalam, maksudnya jika laki-laki hanya mampu sampai ke ruang tamu maka perempuan mampu mempromosikan dirinya hingga ke dapur, karena perempua juga memiliki jurus dan trik tersendiri untuk meyakinkan seseorang itu sendiri. Contoh saja, Ibu Hj. Nurbaya Toppo, beliau merupakan perempuan peraih suara terbanyak di kabupaten Sinjai sebanyak 2.200 suara" (hasil wawancara bersama anggota DPRD dan sekertaris fraksi PPP tanggal 2 Februari 2021)

Hal ini menjelaskan bahwa juga perempuan mampu memahami akan banyaknya pemilih perempuan dan yang bisa menyentuh hati pemilih perempuan adalah sesama perempuan Sehinggah partai memberikan keterwakilan perempuan karena perempuan memiliki potensi itu dan potensi itu pengaruhnya luar biasa dan juga kerena perempuan mudah menarik sesama perempun, tingkat sosial perempuan tinggi sehingga dengan mudah meraih simpati masyarakat juga karena perempuan dianggap bisa meraih suara karena pemilih yang banyak berasal dari perempuan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Disamping itu partai tidak membedakan antara caleg perempuan dan laki-laki jumlah pemilih perempuan jauh lebih besar di banding laki-laki yang penting mereka memiliki kompotensi dan potensi suara serta mau bekerja untuk partai serta bisa bekerja untuk masyarakat dan didukung dengan jumlah pemilih perempuan jauh lebih besar dibanding pemilih laki-laki.

Jadi ada berbagai faktor yang mendukung kesetaraan gender khususnya di bidang politik terkait dengan legislative dan eksekutif salah satunya terkait kebijakan pemerintah pemberian kouta 30%, awereness perempuan terhadap melek politik.

2. Faktor Penghambat

a. Penyebaran Informasi

Dalam mewujudkan kesetaraan gender permasalahan serta tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Berbagai kendala baik dari segi aksesibilitas informasi atau kebijakan yang belum terimplementasi dengan baik ataupun datang dari individu masing-masing yang menghambat tewujudnya kesetaraan gender khususnya dalam bidang politik di Kabupaten Sinjai.

Seperti yang diutarakan oleh J.A *founder* Ruang Emansipasi Sinjai, bahwa:

> "masih perlu lebih ditingkatkan informasi agar tersebar luas dan dapat diakses juga oleh komunitas yang berbasis gender karena masyarakat masih perlu sering dilihat, apa yang mereka alami. Karena perempuan perlu didorong dan memberikan pedekatan secara persuasive, tidak hanya berkoar-koar di satu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

forum tetapi butuh pemahaman lebih" (hasil wawncara bersama ruang emansipasi sinjai tangal 9 februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat di lihat bahwa sosialisasi dan pendekatan untuk memberikan pemahaman serta edukasi belum terlalu maksimal. Karena masih ada bebrapa masyarakat yang belum terpapar infomasi dengan jelas dan masih menganggap tabuh terkait kesetaraan gender sehingga berdampak pada aksesibiltas untuk berpolitik dan memahami terkait politik pada kesetaraan gender.

Seperti yang dikatakan oleh informan dari Kopel Sinjai. A juga menuturkan bahwa:

"masalah kesadaran perempuan itu sendiri untuk terlibat, kemudian yang kedua akses informasi terutama misalnya ada teman-teman yang ingin berpartisipasi tetapi tidak dapat informasinya, istilahnya selesai kegiatan baru dengan infonya" (hasil wawancara Kopel Sinjai 10 Februari 2021)

Dapat dilihat bahwa akses informasi menjadi salah satu kendala masyarakat untuk berkontribusi atau mendapatkan pengetahuan baik terkait seminar politik atau edukasi tentang politik. Sehingga masyarakat semakin ketinggalan karena kurang terpapar informasi.

b. faktor nilai patriarki

Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah politik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota legislative ataupun partai politik. Ada anggapan juga bahwa

perempuan tidak otonom dalam pengambilan keputusan dan tidak identik dengan fungsi kepemimpinan.

Pendapat inilah yang disebut *patriarchy value* masih kurangnya kepercayaan kepemimpinan oleh perempuan, karena system social sejak dahulu yang dipercaya bahwa laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral dan hak istimewa sosial. Maka dari itu masyarkat masih cendurung menaruh kepercayaan besar terhadap laki-laki.

Selaras dengan pendapat anggota DPRD juga sebagai sekertaris PPP bahwa:

> "Sebagian masyarakat masih bermasa bodoh untuk melek politik, contoh kecil kemarin pada saat pemilu 2019 memang banyak caleg yang beranggapan saya ini perempuan hanya dipasang untuk memenuhi kouta 30%. Nyatanya kami memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bukan berarti kita perempuan bukan berarti tidak mampu mengalahkan caleg laki-laki. Tapi tergantung dari kita untuk memberikan kerja-kerja dan keyakinan kepada masyarkat bahwa perempuan bisa juga" (hasil wawancara bersama anggota DPRD kabupaten Sinjai tanggal 2 Februari 2021)

Juga terkait kesadaran perempuan itu sendiri untuk terlibat karena menganggap bahwa perempuan dalam hal ini pemenuhan kouta 30% hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam kontes politik sehingga masih enggan untu terlibat karena belum melihat dari sudut pandang lain bahwa 30% kouta perempuan adalah sebuah peluang dan kesempatan bagi mereka untuk berkiprah dan berkontribusi kepada sesamanya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dan terkait kepercayaan masyarakat masih perlu di tingkatkan hambatan keterwakilan perempuan kerena diantara sesama perempuan terjadi persingan, faktor tidak mau disaingi sesama perempuan dan masih kurangnya kepercayaan terhadap perempuan jadi dengan melalui pemahaman Pendidikan politik di massive kan hingga menyentuh lini-lini masyarakat terdalam dalam upaya pemberian akses pengetahuan sehingga informasi yang ada tidak begitu saja di percaya serta meminimalisir hoax terkait isu politik.

Jadi permasalahan terkait faktor penghambat dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu masih kurangnya sosialsasi secara terbukan dan persuasife, masih adanya pemikiran bermasa bodoh untuk melek politik dan beberapa anggaran yang terpotong sehingga kurang maksimal dana yang di dapatkan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penlitian ini adalah:

1. Indikator yang menjadi penguatan eksistensi perempuan dalam bidang politik untuk mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten Sinjai yaitu adanya implementasi kebijakan melalui PERDA nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dan dorongan untuk lebih responisif gender, kemudian kapabilitas dalam dunia politik sudah meningkat, karenatidak ada lagi perbedaan gender dalam memimpin tergantung dari kapasitas perempuan dan kinerja, serta akesibilitas tentang politik telah banyak diberikan baik dari instansi pemerintah ataupun legislative.
2. Faktor pendukung dalam penguatan eksistensi perempuan yaitu dukungan kebijakan dan dukungan masyarkat. Kemudian faktor penghambat dalam pengutan eksistensi perempuan dalam bidang politik yaitu aksesibilitas informasi dan faktor *patriarchy value.*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Perempuan seharusnya menyadari akan peluang yang mereka miliki untuk terjun di dunia politik dengan melihat betapa pentingnya mereka

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

duduk dilegislatif, eksekutif dan yudikatif untuk memeperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

2. Pemerintah kabupaten Sinjai diharapkan agar bisa konsisten dan lebih proaktif memberikan edukasi, pemahaman ke masyarakat terkait kesetaraan gender dalam bidang politik serta banyaknya kebijakan/program yang pro terhadap perempuan.
3. Minimal 30% program pemerintah daerah dan APBD terintegrasi dengan anggaran yang responsive gender.
4. Pemerintah lebih banyak berkolaborasi dengan komunitas berbasis perempuan untuk lebih menguatkan kapasitas perempuan dalam politik.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Hani Febriyanti, A. K. (2013). Deskripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pendaftaran di TPPRJ RSUD Tugurejo Semarang Tahun 2003. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Huda, N., Rasyid, A. A., Suyata, P., & Sumarno, S. (2013). Pengembangan Model Penelitian Perspektif Gender. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, *17*(2), 304–317. https://doi.org/10.21831/pep.v17i2.1702

Lestari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). *Formulasi strategi partisipasi partai politik dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan pada pemilu 2019*. *1*(1), 52–61.

Mandacan, M. W., Sabijono, H., & Runtu, T. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dprd Terhadap Pengawasan Keuangan (Apbd) Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(04), 98–107. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20025.2018

Mifdal Zusron Alfaqi. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *28*(2), 111. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5451/2120

Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, *9*(2), 257–270. https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125

Nelli, J. (2015). EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, *14*(2), 254. https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Puspitawati, Harien. (2009). Analisis Gender Dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga. *Makalah Seminar Disampaikan Pada: Pelatihan Metodologi Studi Gender Kamis*, *13*, 123–126.

Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, Teori dan Analisi Gender. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia.*, *4*(Zeitlin 1995), 1–16. https://doi.org/10.1017/S0033583501003705

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

Sumule, M. N., Kusnma, A. R., & Hasanah, N. (2019). *STUDI TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM KABUPATEN KUTAI TIMUR*. *7*(1), 72–81.

Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah*, *7*(2), 120–130.

Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, *1*(1), 63–83. https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

L

A

M

P

I

R

A

N

➢ Dokumentasi

(Wawancara Bersama Anggota DPRD Kab. Sinjai)

(Wawancara Bersama Kabid Kesetaraan Dan Data Gender Kab. Sinjai)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

(Wawancara Bersama Founder Ruang Emansipasi Sinjai)

(Wawancara Bersama Kabid Politik Dalam Negeri)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

(Wawancara Bersama Ibu Wakil Bupati Sinjai)

(Wawancara Bersama Ibu Wakil Bupati Sinjai)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

AULIA RAMDHANI ARIEF, lahir pada tanggal 31 Desember 1997 di Jl. Bulu Lasiai tepatnya di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, anak ketiga dari 4 bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Misdal Arief S.Pd dan Hj. Rahmiah S.Pd. Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari TK Aisyiah Kabupaten Sinjai. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan di SDN 124 LURA tahun 2003 dan lulus di tahun 2009 di Kabupaten Sinjai. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Neg. 2 Sinjai tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan di SMA Neg. 1 Sinjai Utara tamat 2015. Setelah tamat SMA penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui penerimaan mahasiswa jalur mandiri dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi strata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pernah mengikuti Darul Arkam Dasar (DAD) Muhammadiyah. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul Penguatan Eksistensi Perempuan Pada Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai. Semoga dengan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari Universitas Muhammadiyah Makassar di masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN